

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Ilmu Pemerintahan

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2005 : 13)

Selama ini pemerintahan yang dinyalakan belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini di karenakan kinerja aparat yang masih lemah. Secara substantif, menurut Rasyid (1997:48) tugas pokok pemerintahan di dabagi dalam 3 fungsi pokok yakni :

- 1) Pelayanan (service)
- 2) Pemberdayaan (empowerment)
- 3) Pembangunan (development)

Pembinaan sebagai suatu konsep yang selalu di pakai untuk mamacu pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan sementara pembangunan akan berhasil apabila

masyarakat tahu dan mengerti apa yang seharusnya ia lakukan sebagai bagian dari penggerak pembangunan. Karena itu peranan pemerintah dalam hal ini Lurah di harapkan melakukan berbagai pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dilingkungan kerjanya..

Ndraha (2011:74-75) menjelaskan berbagai konsep tentang pemerintahan sebagai berikut :

1. Badan publik, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh *rute pro paiding* suatu jasa atau layanan melalui otorisasi atau privatisasi.
2. Pemerintah dalam arti terluas adalah semua lembaga negara seperti di atur dalam Undang-Undang Dasar(konstitusi) suatu negara.
3. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.
4. Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
5. Pemerintah dalam arti tersempit yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi, birokrasi adalah aparat pemerintah yang di angkat atau ditunjuk dan bukan di pilih melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan.
6. Pemerintah dalam arti pelayanan, di ambil dari konsep *civie servanc*, di sini pemerintah di anggap sebagai sebuah warung (Toko) dan pemerintah adalah pelayanan yang melayani pelanggan (Pembeli)
7. Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tertinggi), pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.
8. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, berbeda dengan pemerintah pusat yang di anggap mewakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.
9. Pemerintah dalam konsep wilayah. Pemerintah dalam arti ini dikenal dengan negara yang menggunakan azas dekonsentrasi dan desentralisasi, contohnya Indonesia di bawah UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokokpokok pemerintah di daerah. Kekuasaan urusan pusat di daerah di kelola oleh pemerintah wilayah.
10. Pemerintah dalam konsep pemerintahan dalam negeri, konsep ini berasal dari tradisi pemerintahan belanda di bahas secara panjang lebar oleh bayu suryaningrat dalam mengenal ilmu pemerintahan.

11. Pemerintah dalam konsep konteks ilmu pemerintahan adalah semua lembaga yang di anggap mampu, normatif atau secara infirik memproses jasa publik dan layanan civil.

Lebih lanjut menurut Ndaraha (2007:9) mengatakan Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan pelayanan civil dalam hubungan pemerintah (Sehingga dapat diterima) pada saat di butuhkan oleh yang bersangkutan.

2. Kebijakan Publik

Menurut Ndraha, (2008:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhanan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil, sedangkan Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayan civil bagi setiap anggota melalui hubungan Pemerintah. Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan pemerrintahan terbagi menjadi 3 fungsi yaitu :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Didalam menjalankan ketiga fungsi diatas Pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan Pemerintahah. Dunn (2006:22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Kemudian pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki ciri tersendiri, dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan), alternatif dalam arah yang dikehendaki (Winarno,2007:6)

Menurut Ibrahim (2009:60-61)Setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap kebijakan publik itu berjalan secara efektif. Tolak ukur kebijakan yang baik adalah:

- a. Berkeadilan sosial,
- b. Partisipasi stakeholder pmebangunan secara keseluruhan,
- c. Peduli lingkungan,
- d. Pelayanan publik yang berkualitas,
- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Negara vise versa,
- f. Analitis etis (jujur, oljektif, adoptif)

Menurut Boediardjo (2009:20) kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Menurut Dunn, (2006:105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah, adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah:

- a. Pengolahan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau isntansi yang dapat ddijadikan sebagai pertmbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
- b. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.

- c. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
- d. Penilaian terhadap fungsi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan

Menurut Nugroho, (2008:115) dengan demikian dapat juga diketahui bahwa terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik yaitu : (1) Perumusan Kebijakan (2) Implementasi Kebijakan, dan (3) Evaluasi Kebijakan.

Selain itu Nugroho, (2008:149) juga menyatakan bahwa kebijakan mempunyai 6 (enam) kriteria yaitu :

- a. Efektifitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Perataan
- e. Responsivitas
- f. Kelayakan

Menurut Syafi'ie (2007:107) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah. Seperti di kemukakan di atas, teori *good governance* mengahruskan penggunaan atau upaya untuk merancang bangun perumusan kebijakan, proses implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Ketiganya dirancang bangun ini saling berkomplementer satu sama lain yang merupakan fokus dari ilmu administrasi publik. Sebagai suatu rancangan bangun, implementasi kebijakan tidak lahir dengan sendirinya melainkan beragkat dari konsep kebijakan publik (*publik policy*).

3. Teori Organisasi

Menurut pendapat Moekijat (2005:6) organisasi adalah kerangka di dalam mana orang-orang bertindak dan organisasi mengandung pengertian adalah penyusun tenaga kerja dan pembagian tugas-tugas. Mengorganisasi adalah menyusun bagian-bagian sedemikian rupa sehingga seluruhnya bekerja sebagai suatu badan yang disatukan.

Kelangsungan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya peranan dari segenap anggota organisasi yang mampu melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa anggota organisasi merupakan salah satu sumber daya manusia yang mendukung kelangsungan suatu organisasi.

Organisasi merupakan suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui hirarki otoritas dan tanggung jawab. Tercapainya efektifitas pelaksanaan tugas sebagai bidang organisasi, tentunya tidak terlepas dari proses pengorganisasian.

4. Teori manajemen

Menurut Ndaraha (2011:159) manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha “doing right things” secara *efficient* “doing things right” dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan. Jadi unsur-unsur manajemen adalah :

1. Tujuan organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berkompeten.
2. Fungsi, yaitu perencanaan usaha untuk menetapkan output dan outcome yang dikehendaki, pengorganisasian sumber-sumber agar siap pakai/siap gerak, penggerakan atau penggunaan sumber-sumber guna menghasilkan output, dan control penggerak atau pengguna sumber-sumber supaya output

dan outcome yang dihasilkan atau dinikmati konsumen sesuai dengan output/outcome yang diharapkan.

3. Siklus produk yang berawal dari consumer dan setelah melalui beberapa rute, berakhir pada konsumen.

Manajemen menunjukkan fungsi-fungsi yang perlu dijalankan (dioperasikan) terus-menerus dan berturut-turut untuk mencapai suatu sistem yang disebut efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Adapun ruang lingkup manajemen pemerintahan menurut Ndraha (2013:160) terlihat melalui fungsi manajemen

- 1) Perencanaan pemerintahan.
- 2) Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan
- 3) Penggunaan sumber-sumber pemerintahan
- 4) Kontrol pemerintahan

5. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan Ndraha (2003:201) menjelaskan evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Selanjutnya terdapat tiga model evaluasi yang dikemukakan oleh Ndraha (2003:202) yaitu :

1. Model before-after, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan, treatment). Tolak ukurnya adalah kondisi before,
2. Model Das Sollen-das Sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah Das Sollen.
3. Model Kelompok kontrol-kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya kelompok kontrol.

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa

Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2008:220).

Menurut Sudarsono (2009:119) bahwa evaluasi adalah dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kegiatan yang akan datang supaya lebih baik.

Dari beberapa fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli, kita dapat kesimpulan tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program.

Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Pelaksanaan evaluasi menurut Firman (2007:59) terdiri dari dua tahap :

- a. Pra kegiatan. Pertama-tama evaluasi dilakukan baik oleh individu maupun team, penting untuk mengetahui atau menyelidiki perubahan-perubahan, kebijaksanaan-kebijaksanaan dan arah prioritas sebelum saat itu dan dimasa mendatang untuk mengetahui apakah program yang sedang dievaluasi tersebut masih relevan dan diperlukan.
- b. Kegiatan Evaluasi. Dalam melakukan proses evaluasi selama evaluasi ada beberapa etik birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erta hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi diantaranya adalah:
 - a. Semua tugas dan tanggung jawab pemberi tugas dan pemberi tugas harus jelas.

- b. Pengertian dan konotasi yang tersirat dalam evaluasi yaitu mencari kesalahan harus dihindari.
- c. Kegiatan evaluasi dimaksudkan disini adalah membandingkan rencana dengan pelaksanaan dengan melakukan pengukuran/pengukuran kuantitatif/kualitatif totalitas program secara teknis.
- d. Team yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran/nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran/nasehat tersebut serta pembuat keputusan atas dasar nasehat/saran-saran tersebut berada ditangan manajemen program.
- e. Dalam proses pengambilan keputusan yang telah didasarkan atas data-data/penemuan teknis perlu dikonsultasikan sebaik mungkin karena menyangkut kelanjutan program.
- f. Hendaknya hubungan dan proses selalu didasari oleh suasana konstruktif dan obyektif serta menghindari analisa-analisa subyektif.

6. Tugas dan Fungsi

Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan selanjutnya tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap. Moekidjat (1998;11)

Sedangkan menurut Thoha (2011;76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi menacapai suatu tujuan.

Adapun menurut Moenir (2010;18) tugas digunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau unsur dalam suatu jabatan, suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Moenir (2010;24) fungsi adalah rincian-rincian tugas sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seseorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Menurut Winardi (2003;26) tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan.

Defenisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut Tjiptono (2009:10), menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

7. Pemberdayaan Masyarakat

Suharto Widjaja(2003:169) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengentaskan diri secara mandiri di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup dengan upaya, meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau pemberi modal saja, tetapi diikuti dengan perubahan struktural sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses ;

1. Akses terhadap sumberdaya
2. Akses terhadap teknologi
3. Akses terhadap pasar
4. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Langkah-langkah strategis dalam pemberdayaan masyarakat menurut Kartasmita dalam Giroth (2004:99), bahwa ada sembilan langkah strategis harus ditempuh untuk mengembangkan ekonomi rakyat melalui pemberdayaannya, yaitu: pertama, peningkatan akses kedalam aset produksi (productive assets), kedua, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, ketiga, pembangunan pra-sarana, keempat, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, kelima, kebijakan pengembangan industri, keenam, kebijakan ketenagakerjaan merangsang tumbuhnya kerjasama mandiri sebagai cikal bakal wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang, ketujuh, pemerataan pembangunan antar daerah dan sentralisasi, kedelapan, pembangunan kelembagaan pedesaan, kesembilan, adanya perangkat peraturan perundangan yang memadai melindungi dan mendukung pengembangan ekonomi rakyat ditujukan khusus untuk kepentingan rakyat kecil.

Salah satu langkah strategis dalam pemberdayaan masyarakat ialah pembangunan kelembagaan kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, LPM dan bentuk-bentuk lembaga masyarakat lainnya. Kartasmita dalam Giroth(2004:99) menyatakan “pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan menodorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

8. Partisipasi Masyarakat

Bornby (1974) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedang di kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theodorson, 1969)

Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat lain (Raharjo, 1983)

Beal (1964) menyatakan bahwa partisipasi, khususnya yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (exogenous change).

Karakteristik dari proses partisipasi ini adalah, semakin mantapnya jaringan sosial (*Social Network*) yang “baru” yang membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Karena itu, partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial baru yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.

Sebagai suatu kegiatan, Verhagen (1979) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian : kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya

interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai:

1. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki
2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri.
3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbang-an yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Lebih lanjut analisis tentang “modal sosial” (*social capital*) terhadap arti penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menunjukkan bahwa (Woolcock dan Narayan, 2000) partisipasi dibutuhkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat maupun sinergi dalam “jejaring komunitas” (*community network*).

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut ketertiban masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas diatas serta peaparan beberapa konsep yang telah mendukung penelitian ini yang berjudul “Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai”. Kemudian diukur dengan teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis mejelaskan hubungan unsurunsur dalam analisi keinerja pegawai dalam alur penelitian yang dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir Penelitian tentang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi penelitian 2017

C. Hipotesis

Jika lurah melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat maka masyarakat akan mampu di berdayakan.

D. Konsep Operasional

Dalam Penelitian ini agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbedabeda. dari istilah-istilah yang digunakan dalam analisa, maka penulis akan memberikan batasan-batas tentang apa yang dimaksud dengan pelayanan publik yang berpedoman pada teori-teori yang digunakan dan disesuaikan dengan konsep yang ada pada daerah penelitian serta masalah yang akan diteliti.

1. Evaluasi adalah penilaian secara menyeluruh dari sebuah usaha atau kegiatan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah kegiatan berhasil atau tidak.
2. Evaluasi kebijakan adalah sebagai kegiatan fungsional yaitu evaluasi kegiatan dipandang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
3. Fungsi merupakan kegiatan rutin organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi dan mengenai pembagian tugas serta di bagian mana suatu organisasi tersebut memiliki karakteristik bidang tertentu.
4. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Kecamatan atau Kelurahan merupakan perangkat daerah dibawah Kecamatan .
5. Lurah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.
6. *Tahapan Persiapan* adalah pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat telah cukup memadai.

7. *Tahapan Sosialisasi* adalah bagaimana sebuah usaha penyelenggaraan pemberdayann masyarakat atau kegiatan tersebut dilaksanakan langsung kepada masyarakat.
8. *Tahapan Perencanaan* adalah penilaian pada perencanaan pemberdayaan masyarakat agar terselenggara.
9. *Tahapan Pelaksanaan Kegiatan* adalah memfokuskan diri pada dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pada penyelenggara pemberdayaan masyarakat pada usaha kegiatan tersebut.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendefenisikan kegiatan atau memberikan suatu opresional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Tabel 2.1 Operasional variabel tentang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5

Evaluasi Pelaksanaan menurut Ndraha (2011 : 201) adalah proses pembandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya	Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	a. Tahapan persiapan	a. Programprogram pemberdayaan masyarakat Pelaksana b. program pemberdayaan masyarakat Sumber Daya pendukung pelaksana. c. Sarana dan prasana pendukung	Baik Cukup baik Kurang baik
1	2	3	4	5

		b. Tahapan sosialisasi	a. Pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakatn b. metode kegiatan pemberdayaan masyarakat c. Pemahaman Metode kegiatan pemberdayaan	Baik Cukup baik Kurang baik
		c. Tahapan perencanaan	a. Kualitas usaha penyelenggara pemberdayaan masyarakat b. Seberapa banyak usahadalam pemberdayaan masyarakat Hasil c. kegiatan pemberdayaan masyarakat	Baik Cukup baik Kurang baik
		d. Tahapan pelaksanaan kegiatan	a. Dampak terhadap pemerintah Dampak terhadap masyarakat b.	Baik Cukup baik Kurang baik

Sumber : Modifikasi Penulis, 2018

F. Teknik pengukuran

Untuk mempermudah menganalisa data, maka penilaian terhadap pelaksanaan variabel atau indikator di bagi dalam tiga tingkatan atau variasi, adapun penilaian tersebut adalah : baik, cukup baik, kurang baik. Untuk penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat maka dibuatkan pengukuran variabel sebagai berikut:

Baik : Apabila semua indikator berada pada kategori baik atau pada persentase berkisar antara 67%-100%.

Cukup Baik :Apabila 2 dari 4 indikator berada pada kategori baik atau pada persentase berkisar antara 33%-66%.

Kurang Baik :Apabila hanya ada 1 dari 4 indikator berada pada kategori baik atau pada persentase berkisar antara 0%-33%.

Selanjutnya untuk setiap indikator dapat dilakukan pengukuran berikut: 1.

Tahapan Persiapan

Baik :Apabila semua indikator berada pada kategori baik atau pada persentase berkisar antara 67%-100%

Cukup Baik :Apabila semua indikator berada pada kategori baik atau pada persentase berkisar antara 34%-66%.

Kurang Baik :Apabila semua indikator berada pada kategori baik atau pada persentase berkisar antara 0% - 33%.

2. Tahapan Sosialisasi.

Baik :Apabila semua indikator berada pada kategori baik atau pada persentase berkisar antara 67% - 100%.

Cukup Baik :Apabila semua indikator berada pada kategori baik atau pada persentase berkisar antara 34% - 66%.

Kurang Baik :Apabila semua indikator berada pada kategori baik atau pada persentase berkisar antara 0%-33%.

3. Tahapan Perencanaan

Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah

diberikan oleh responden tentang adanya penilaian pada hasil seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dari 3 sub indikator, berkisar 67% – 100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya penilaian pada hasil seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dari 2 sub indikator, berkisar 34% – 66%

Kurang Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya penilaian pada hasil seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dari 1 sub indikator, berkisar 0% – 33%

4. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.

Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya penilaian dalam memfokuskan dampak yang diterima oleh masyarakat luas dan pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 2 sub indikator tersebut, berkisar 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah

diberikan oleh responden tentang adanya penilaian dalam memfokuskan dampak yang diterima oleh masyarakat luas dan pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 1 sub indikator tersebut, berkisar 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya penilaian dalam memfokuskan dampak yang diterima oleh masyarakat luas dan pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang memiliki tidak ada memenuhi sub indikator tersebut, berkisar 0%-33%.

